



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM.....	2
C. ISU STRATEGIS.....	3
D. SISTEMATIKA.....	4
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
B. PROGRAM UNGGULAN.....	15
C. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET.....	18
D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	19
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023.....	19
F. PERJANJIAN KINERJA.....	20
G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA.....	21
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
BAB IV.....	47
PENUTUP.....	47
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	47
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS.....	48

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LKJiP atas dasar kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efektif, efisien dan akuntabilitas menjadi satuan unit kerja instansi pemerintahan yang *good governance*.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah dalam kerjanya semakin lebih baik di tahun yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak – Pajak Daerah untuk mencapai target pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan.

Kemudian apabila dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang telah tersusun masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran akan kami perbaiki pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang akan datang.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**



SUBANDI, SE, M. Si
Pembina
NIP. 19690711 199103 1 010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan selama Tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Brebes Tahun 2023 - 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 merupakan tahap keempat RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 dan merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan visi pembangunan Kabupaten Brebes yang akan dicapai di tahun 2025

sebagaimana tertuang dalam visi RPJPD yaitu “Kabupaten Brebes Yang Madani, Maju dan Sejahtera”.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Laporan Kinerja ini diharapkan untuk mewujudkan kinerja organisasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan serta dapat sebagai masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang berkelanjutan sesuai visi dan misi Kabupaten Brebes.

B. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Brebes untuk 10 (sepuluh) Pajak Daerah yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Brebes,

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- 3) pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- 4) pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

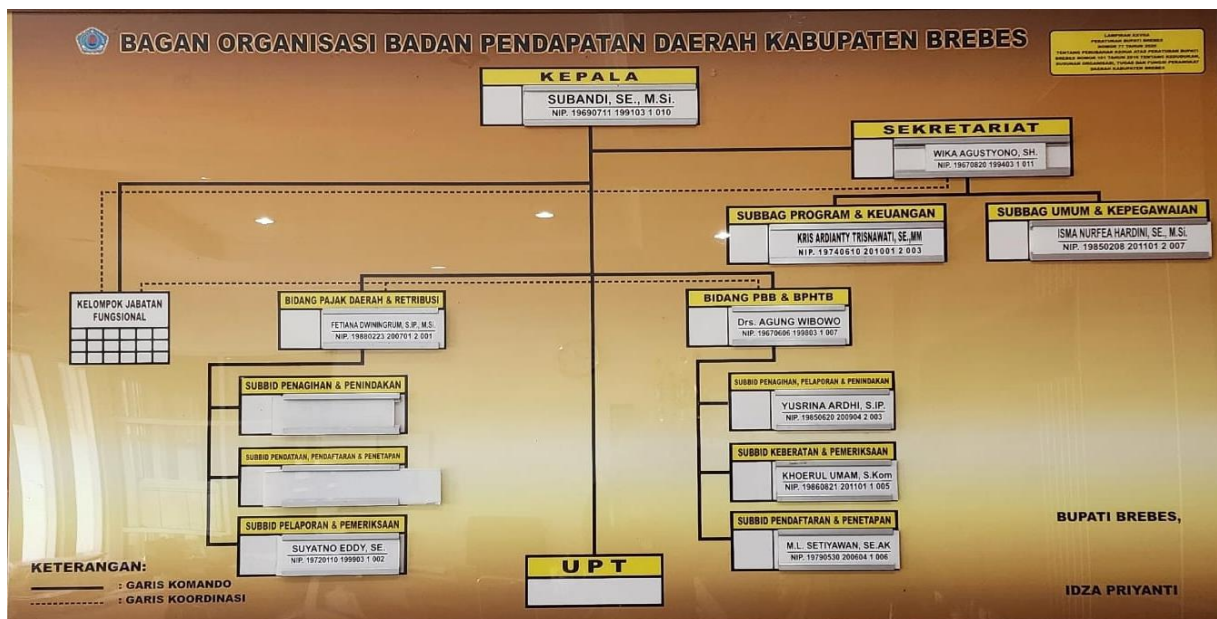
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dengan Unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari :
 - 1) AKPD Sub Penagihan dan Penindakan;
 - 2) AKPD Sub Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - 3) AKPD Sub Pelaporan dan Pemeriksaan.
- d) Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - 1) AKPD Sub Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
 - 2) AKPD Sub Keberatan dan Pemeriksaan;
 - 3) AKPD Sub Pendaftaran dan Penetapan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

3. Sumber Daya

4.1. Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 25 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Badan (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 2 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala AKPD Sub Bidang.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Sub Koordinator dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Badan Pendapatan Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brebes bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	8	5	3
2	S1	15	8	7
3	DIII	-	-	-

4	SLTA	2	1	1
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		25	14	11

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	1	-	1
3	III	21	11	10
4	IV	3	3	-
Jumlah		25	14	11

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	3	3	-
4	Diklatpim IV	5	3	2
Jumlah		8	6	2

4.2. Sumber Daya Modal

Tabel 2.4

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	AC Split	25	B
2	Alat Penghancur Kertas	1	B
3	Alat Sandi lainnya	9	B
4	Alat Studio	1	B
5	Bangku tunggu	3	B
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	B
7	Bangunan Tempat Parkir	1	B
8	Bracket Standing Peralatan	1	B
9	Brankas	1	B
10	Camera Film	1	B
11	Camera Elektrik	1	B (2023)
12	Card Reader (Peralatan Mainframe)	2	B
13	CCTV-Camera Control Televisi System	1	B
14	Dispenser	3	B
15	External Portable Hardisk	4	B
16	filling Cabinet Besi	15	B
17	Genset	1	B
18	Handy Talky (HT)	2	B
19	Hard disk	5	B
20	Jam Mekanis	10	B
21	Kompor Gas	1	B
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	B
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	B
24	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	9	B
25	Kursi Putar	20	B
26	Kursi Rapat	93	B
27	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Es II	9	B
28	Kursi Tamu	1	B

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
29	Laptop	14	B
30	Layar film/ Proyektor	1	B
31	Lemari Besi Metal	6	B
32	Lemari buku arsip dinamis	3	B
33	Lemari Es	6	B
34	Lemari Kayu	3	B
35	Lemaro sorok	3	B
36	Loudspeaker	10	B
37	Mobil	7	B (Mutasi ke Perwaskim)
38	Mainframe (komputer Jaringan)	1	B
39	Meja 1/2 Biro	2	B
40	Meja Cetak	1	B
41	meja kerja kayu	32	B
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	B
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	B
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	B
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	B
46	Meja Rapat	11	B
47	Meja Rapat Pejabat eselon II	1	B
48	Meja Resepsionis	1	B
49	Meja Tamu Biasa	1	B
50	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat es II	1	B
51	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat es III	2	B
52	mesin hitung uang	1	B
53	Microphone/Wireless MIC	11	B
54	Modem	4	B
55	Monitor	10	B
56	Note book	7	B
57	Overhead Projector	1	B
58	P.c UNIT	48	B
59	Pagar Permanen	1	B

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
60	Papan Visual/Papan Nama	1	B
61	Peralatan Jaringan Lainnya	11	B
62	Peralatan Mainframe Lainnya	2	B
63	Peralatan Personal Komputer Lainnya	10	B
64	Perforator Besar	1	B
65	personal computer lainnya	14	B
66	Power Mixer	1	B
67	Printer (peralatan Personal Komputer)	57	B
68	Rak Besi	2	B
69	Rak Kayu	9	B
70	Router	4	B
71	Scanner	2	B
72	Sepeda Motor	51	B (Mutasi ke Kec. Wanasari)
73	Server	4	B
74	sice	1	B
75	Sofa	1	B
76	Software	15	B (2023)
77	Sound system	2	B
78	Tabung Gas	1	B
79	Tangga Alumunium	1	B
80	Telepon Digital	1	B
81	Televisi	8	B
82	Troly	1	B
83	Tustel	1	B
84	UPS	8	B

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Adanya penghindaran pajak (tax aversion) oleh wajib pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- 2) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perpajakan belum memadai;
- 3) Sistem Informasi Manajemen Perpajakan yang belum memadai;
- 4) Data tentang obyek pajak kurang akurat sebagai akibat dari masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya;
- 5) Kurang intensifnya koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan, Manpa, Kepala Desa dan Perangkat Desa

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi (yang ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026 ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 , yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah dan kekurangan daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 yang digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan /atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dimana ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 dengan RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, telah ditetapkan 6 tujuan dan 38 sasaran serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes, visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

“Brebes Yang Madani, Maju, dan Sejahtera“

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Brebes dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)
		Meningkatkan tata kelola organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang membidangi urusan keuangan, maka program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BAPENDA. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Optimalisasi PAD.

A. Program Umum/Rutin

Program yang menunjang pada Program Umum / Rutin pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang memuat kegiatan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes diantaranya ada Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memuat kegiatan teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kode	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan BAPENDA tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya sesuai misi yang tercantum di dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2
SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	430.500
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)	3000
		Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	82

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Nama Program	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan	15
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran

Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja BAPENDA Kabupaten Brebes 2023 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 2023, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan sesuai Anggaran Tahun 2023 yang ada di Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2023.

G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah, menjadi salah satu perhatian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan pendapatan baik pada fase pendataan potensi pajak daerah maupun proses penerimaan pajak antara lain adalah :

- a. Sistem Pendataan Online (Sipentol)
- b. E-BPHTB
- c. System Host-to-Host dengan Bank Jateng
- d. Simda Pendapatan
- e. SISMIOP
- f. SmartMap
- g. Portal Pajak Daerah (sekarang namanya jejaka)
- h. mPBB
- i. System Host-to-Host dengan Pusdatin ATR/BPN
- j. DBKB 2000 - untuk penilaian individu Objek PBB-P2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2023 - 2026, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 memasuki tahun pertama di Tahun 2023. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026 yaitu “**Brebes Yang Madani, Maju, dan Sejahtera**”, dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah:

1. Mewujudkan pengalaman nilai - nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;**
4. **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;**
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2023 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan urusannya yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada Tahun 2023, maka dilakukan analisis capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah](#), dengan tahapan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis

pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Dalam penjelasan analisis pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Penghitungan Realisasi Indikator Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{481.244.369.182}{492.051.389.008} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
BAPENDA Kabupaten Brebes
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatkannya penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	492,05	481,24	97,80	Baik	Hasil Rekonsiliasi BUD dan OPD Pelaksana PAD Kab. Brebes
2	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Brebes	Jumlah masyarakat miskin ekstrem yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)	3000	3000	100	Baik	https://1drv.ms/x/s!AgwACF-9my5Ik70c6y9_Lx-BgbMSXQ?e=eu99HI
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatkannya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	82	86,75	105,79	Sangat Baik	Laporan SKM Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes

Perbandingan antara realisasi dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Brebes yang telah dicantumkan didalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp. 492.051.389.008,- dengan realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp. 481.244.369.182,- dengan hasil prosentase 97,80% kategori “**Baik**” dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama per 31 Desember 2023 Kabupaten Brebes sesuai table 3.2. Sedangkan untuk sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai Renstra Tahun 2023 - 2026 untuk Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah (%) dihasilkan 98,34% dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 179.815.467.425,- terhadap target Pajak Daerah

sebesar Rp. 182.850.000.000,- dengan kategori “**Baik**” dan dibandingkan dengan prosentase PAD Kabupaten Brebes terhadap prosentase Pajak Daerah masih lebih baik kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Brebes. Untuk jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang) dari target 3000 orang telah terealisasi sebanyak 3000 orang dengan kategori “**Baik**” dan untuk nilai Survey Kepuasan dari target nilai 82, Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 mendapat nilai 86,75 dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk sasaran IKU ke-3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes untuk kinerjanya kategori ‘**Sangat Baik**’.

2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021

Perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama terkait PAD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021, ada penurunan terhadap Tahun 2022 dari 97,82% ke 97,80% sebesar 0,2 % dan terhadap Tahun 2021 penurunan nilai dari pencapaian Target Tahun 2021 sebesar 107,70% ke 97,80% sebesar 9,56%. Dilihat dari perbandingan dua tahun sebelumnya PAD Kabupaten Brebes masih terbilang pada nilai “Baik” walaupun tidak mencapai 100% karena ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapai.

Dan berikut kami rekap data sesuai Laporan Realisasi PAD Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 :

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Anggaran	481.422.097.000	428.736.313.711	492.051.389.008
Realisasi	518.511.128.705	419.395.415.995	481.244.473.182
Prosentase	107,70%	97,82%	97,80%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah

Secara tugas dan fungsinya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi target pendapatan Pajak Daerah sebesar 98,34% dan lebih tinggi pencapaian dari Target PAD Kabupaten Brebes Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes belum mencapai target 100% dikarenakan penetapan target Pendapatan Pajak Daerah terlalu tinggi dari hasil kajian ilmiah yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga institusi.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	Target Akhir Renstra 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	492,051	430,500	114,29%
2	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	Pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam clasement ketetapan pajak buku I (Orang)	3000	3000	100%

3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	86,75	82	105,79%
---	--	--	--	-------	----	---------

Sumber : Bapenda dan Laporan SKM Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 perbandingan antara capaian target Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Tahun 2023 untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tingkat Kemajuan kinerjanya mencapai 114,29% lebih tinggi dari Tingkat kemajuan di Tahun 2022 sebesar 99,67%. Untuk indikator kinerja kemiskinan ekstrim pada tingkat kemajuan Tahun 2023 sesuai realisasi dan target akhir Renstra Tahun 2023 adalah 100% tercapai sedangkan untuk nilai Survey Kepuasan Masyarakat tingkat kemajuan kinerja adalah 105,79% lebih tinggi dari nilai SKM Tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 105,64%.

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai data table 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Kabupaten Brebes untuk realisasi Target PAD lebih tinggi dari perolehan penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah secara prosentase.

Tabel 3.4
Realisasi Target PAD Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kode Akun PAD	Target Tahun 2023			
	Realisasi Kab. Brebes (Milyar)	Prosen (%)	Realisasi Provinsi Jawa Tengah (Milyar)	Prosen (%)
PAD	481.244,36	97,80	17.017,27	95,01
Pajak Daerah	179.815,46	98,34	13.976,72	91,55
Retribusi Daerah	18.106,47	65,42	140,31	101,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	12.681,02	113,47	638,48	101,17
Lain - lain PAD yg sah	270.641,40	100,11	2.261,76	120,60

Sumber Data : Portal BPS dan LRA Kab. Brebes per 5 Pebruari 2024

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target 100% hanya tercapai target 97,80% karena ada beberapa kendala dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Brebes. Dari evaluasi target PAD secara umum yang telah dilaksanakan mengapa nilai realisasi pendapatan belum sesuai dengan rencana dikarenakan :

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Masih banyak pengusaha sebagai subjek pajak/subjek retribusi yang belum menerapkan konsumen sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Anggapan masyarakat bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dibayarkan, reward yg diberikan pemerintah dirasakan belum maksimal;
- d. Masih lemahnya penegakkan hukum terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, dan penyalahgunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan operasional untuk peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut kendala dan hambatan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai di Tahun Anggaran 2023 se-Kabupaten Brebes diantaranya :

No.	Nama OPD	Kendala yang terjadi
1.	Badan Pendapatan Daerah (98,34%)	a. Pajak restoran, adanya aksi penolakan terhadap produk-produk pro israel berpengaruh terhadap penurunan omzet penjualan pada Starbuck dan Mc Donald yang memberikan kontribusi setoran bulanan yang cukup tinggi;

		<p>b. Pajak reklame dikarenakan banyak space baliho di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar tidak terisi, dampak belanja reklame di perusahaan perusahaan berkurang;</p> <p>c. Pajak parkir dikarenakan tingkat kunjungan ke lokasi yang memiliki lahan parkir sebagai objek pajak mengalami penurunan;</p> <p>d. Pajak minerba dikarenakan penentuan target MBLB didasarkan pada dokumen rencana penambangan masing masing wp lima tahunan, namun realisasi kadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi target rencana penambangan, hal ini dikarenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktor berkurangnya permintaan pasar - faktor cuaca - faktor kebijakan internal wajib pajak - penambangan PT Indocement tidak beroperasi secara maksimal dikarenakan masih berfokus penambangan di wilayah perbatasan Kabupaten Tegal; <p>e. Target PBB mengalami kenaikan 10 Milyar dbandingkan tahun sebelumnya dan di Tahun 2023 pencapaian target hanya sebesar 99,44 %. Belum tercapainya target dikarenakan belum adanya sanksi yg mengikat kepada WP dan tindakan hukum bagi perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB. Serta belum memadainya tempat - tempat pembayaran yang tersedia</p>
2.	<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (42,08%)</p>	<p>a. Retribusi RPH : adanya penambahan target retribusi sebesar 400 juta yang direncanakan akan dipenuhi dari retribusi Rumah Potong Unggas (RPU) di Limbangan Wetan, sampai dengan hari ini masih Proses Lelang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan calon Pengguna RPU;</p> <p>b. Retribusi sewa tanah dan Bangunan : Beberapa peternak mengalami penurunan usaha, sehingga belum mampu membayar sewa, namun dari Dinas sudah beberapa kali menyurati kepada peternak pengguna, dan mereka berjanji di Bulan Desember akan melunasi;</p> <p>c. Retribusi Produksi Usaha Daerah Pembibitan Itik dll : Penjualan produksi usaha pembibitan akan dilakukan di pertengahan Desember (DOD itik, domba bakalan dan sapi bakalan)</p>

3.	DLHPS (43,89%)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pemungutan retribusi sampah melalui PDAM tidak dapat dilaksanakan sehingga capaian realisasi masih rendah
4.	Dinas Perhubungan (86,72%)	<ol style="list-style-type: none"> a. Target retribusi parkir yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai potensi retribusi parkir. b. Kurangnya anggaran operasional penarikan retribusi c. Dalam hal penarikan belum semuanya dg sistem online/ non tunai d. Ada regulasi yg mengatur area/ jalur yg tdk boleh di tarik retribusi
5.	Satpol PP (52,66%)	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi alat pemadam kebakaran juga masih produk baru sehingga masih memerlukan waktu dan sosialisasi untuk pelaku usaha untuk sadar akan pentingnya proteksi kebakaran
6.	DIKOPUMDAG (85,64%)	<ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya masyarakat pembeli yang memanfaatkan belanja lewat online (banyak pedagang gulung tikar dn memilih untuk tutup). b. Sejalan musim kemarau panjang dn gagal panen membuat daya beli masyarakat kurang (mengalami penurunan pendptn retribusi 20 % s.d 30%). c. Tidak masuknya pendptn dari SIP (ijin penempatan kios/loos) ke Kasda. d. Hampir semua pasar se kab Brebes perlu adanya rehab total (fasilitas sarpras Yang ada di pasar kurang mendukung dalam persaingan di era globalisasi /modern, e. Pasar tradisional kalah saing) f. Terbatasnya anggaran pemeliharaan pasar sehingga di usia tua pasar banyak fasilitas2 yang sudah tidak layak yang perlu diperbaiki namun anggaran tidak mencukupi) sehingga pembeli memilih belanja di toko2 modern/grosir/on line
7.	DPMPTSP (24,06%)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan PBG memersyaratkan perizinan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan untuk usaha besar (non UMK) menjadi kewenangan pusat. Dalam proses pengajuan perizinan tersebut membutuhkan waktu bertahun - tahun karena menunggu antrian seluruh Indonesia yang hanya ditangani oleh pemerintah pusat, pada akhirnya menghambat proses penerbitan PBG. b. Sewa tanah reklame tahun 2023 hanya dikenakan untuk jalan kewenangan Kabupaten, untuk jalan kewenangan Propinsi dan Nasional tidak ditarik retribusi

		<p>karena pengenaan biaya retribusi sesuai kewenangan.</p> <p>c. Retribusi trayek sudah tidak diatur dalam Perda retribusi Kabupaten Brebes menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya, dengan kata lain izin trayek non retribusi.</p>
8.	Setda Bag. Kesra (48,98%)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak yang menyewa Gedung Islamic Center
9.	DINPERWASKIM (79,65%)	<ul style="list-style-type: none"> • Dari 42 Rusunawa ada 6 yang tidak tersewakan karena bangunan dalam kondisi rusak
10.	Dinas Pekerjaan Umum (77,82%)	<p>a. Alat tidak murni sewa banyak untuk kepentingan dinas, bencana, dan bantuan lain.</p> <p>b. Rekanan juga banyak yang punya alat sendiri, pekerjaan fisik yg berkaitan dgn penggunaan alat mungkin berkurang karena refokusing</p>
11.	DINBUDPAR (77,94%)	<p>a. Mobilisasi informasi cuaca exterm di medsos</p> <p>b. Banyaknya fasilitas DTW yg rusak seperti sampah, MCK dan bak penampungan air.</p> <p>c. Akses jalan menuju obyek wisata banyak yang rusak dan tidak diperbaiki</p> <p>d. Adanya kerusakan daya tarik utama seperti, berkurangnya debit air di wisata pemandian, jembatan dan traking akibat longsor yang belum ditangani, dan atau ditangani belum optimal</p> <p>e. Biaya operasional meningkat sehingga beberapa attraksi utama sehingga pengelola mengajukan Permintaan subsidi bahan bakar agar diberikan harga murah</p> <p>f. Pengaruh medsos dan pertumbuhan kompetitor DTW sekitar sumber retribusi</p>
12.	DINDIKPORA (53,73%)	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala banyak persaingan kolam renang yg lebih bagus dengan fasilitas yg lebih memadai, oleh karenanya mengurangi pengunjung yang datang di kolam renang GOR. Untuk sport center stadion dan GOR SDH bisa memenuhi target pertahun
13.	DINPERINAKEK (81,16%)	<p>Tahun 2023 sebanyak kurang lebih 25 TKA masuk dalam status Exit Permitt Only (EPO)/ resign atau apabila asumsi kurs dollar retribusi sebesar Rp. 18.000.00,/ TKA maka dapat disimpulkan retribusi loss yaitu Rp 450juta. Kriteria EPO yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan perusahaan yg sdh tidak lagi menggunakan TKA 2. TKA resign atas keinginan pribadi 3. TKA yang diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan Kinerja

		4. Pengembangan jaringan perusahaan yang artinya menjadi beda penjamin 5. Perubahan management di perusahaan 6. Perusahaan yang tidak patuh pada peraturan retribusi daerah
--	--	---

Berikut beberapa pencapaian OPD yang nilai dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target pendapatan di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Target	Realisasi	%
1.	BAPENDA	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	675.024.500	284.023.500	42,08%
3.	DLHPS	1.050.000.000	460.875.541	43,89%
4.	Dinas Perhubungan	2.652.000.000	2.299.853.000	86,72%
5.	SATPOL PP	60.000.000	31.595.750	52,66%
6.	DINKOP UMDAG	7.025.000.000	6.016.167.300	85,64%
7.	DPMPTSP	9.235.000.000	2.221.899.785	24,06%
8.	Setda Bag. Kesra	300.000.000	146.950.000	48,98%
9.	DINPERWASKIM	50.000.000	39.825.000	79,65%
10.	Dinas Pekerjaan Umum	250.000.000	194.544.500	77,82%
11.	DINBUDPAR	2.191.200.000	1.707.865.200	77,94%
12.	DINDIKPORA	300.000.000	161.183.000	53,73%
13.	DINPERINAKER	1.500.000.000	1.217.389.800	81,16%

Dari uraian kegagalan diatas, untuk optimalisasi target PAD Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang telah dilaksanakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terhadap Pajak Daerah diantaranya :

1. Melakukan monitoring dan penagihan secara rutin ke desa – desa dan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Brebes;
2. Memasang Tapping Box di beberapa tempat objek Pajak yang mempunyai potensi Pajak Daerah;
3. Melakukan evaluasi monitoring atas pencapaian target Pajak Daerah Kabupaten Brebes;

4. Melakukan Kajian potensi Pajak Daerah;
5. Menjalin kemitraan dengan Badan Pertanahan Negara Brebes dan Kejaksaan Negeri Brebes;
6. Melakukan koordinasi dengan lingkup Pemerintah Daerah untuk pencapaian target Pajak Daerah;
7. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pendataan data – data Wajib Pajak untuk pengkinian data yang update;
9. Membangun Aplikasi Pajak Daerah untuk mempermudah monitoring data Wajib Pajak Daerah;
10. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dan market place online untuk mempermudah pembayaran Pajak Daerah.

Dari upaya optimalisasi yang telah dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes di Tahun 2023 masih perlu adanya perbaikan langkah – langkah untuk pencapaian target di Tahun 2024 diantaranya ketegasan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perangkat Desa dan Wajib Pajak untuk diberi efek jera tidak lagi menggunakan uang – uang negara yang digunakan untuk keperluan pribadi dan Wajib Pajak yang tidak patuh membayar Pajak Daerah.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan OPD pengelola Retribusi Daerah Kabupaten Brebes untuk optimalisasi Retribusi Daerah diantaranya :

1. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes;
2. Melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah melalui instansi / lembaga pemerintah yang mumpuni;
3. Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi online agar mempermudah Wajib Pajak dalam membayar kewajiban Wajib Pajak;

4. Sosialisasi atas regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat Kabupaten Brebes;
5. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal untuk penegakan hukum terkait pelanggaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Dan upaya peningkatan optimalisasi Retribusi Daerah di tahun berikutnya perlu meningkatkan pembayaran Retribusi Daerah dengan Transaksi Non Tunai untuk mengurangi penerimaan uang tunai guna menghindari penyalahgunaan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes sehingga pencapai Target Retribusi Daerah tercapai maksimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	100%	100%	100	5.149.988.240	4.976.428.830	96,63	3,37
2	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	3000	3000	100	2.305.640.500	2.283.853.298	99,06	0,94
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	82	86,75	105,79	13.705.468.495	12.992.807.921	94,80	5,2

Sumber Data : LRA Bapenda Tahun 2023 dan Renstra Th. 2023 – 2026

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data tabel 3.5 diatas menunjukkan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah terhitung memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dimana memiliki nilai di atas 1 (satu) sehingga dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90%, Badan Pendapatan Daerah mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori “**Sangat Baik**” ($\geq 91\%$) yaitu 95,30%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung dan menunjang ketercapaian tujuan dan program kegiatan sesuai RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 - 2026. Secara program dan kegiatan yang tercantum didalam penganggaran semua dilaksanakan sesuai ketentuan. Analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis terhadap program kegiatan untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%)	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 2.Peningkatan PBB dan BPHTB • Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-	100	Menunjang

					<p>sumber pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi; (Obyek Pajak)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; • Dokumen penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa(dokumen) 		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK)		
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang diteliti) (berkas)		
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peta Objek Pajak (bidang) • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 		

					<p>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang diterbitkan (lembar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Dokumen Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan • Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak yang dinilai ulang (OP), • Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (Laporan) • Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK) • Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar) 		
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya		
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo (Rp)		
2	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemberian Stimulus Pembayaran PBB untuk Masyarakat Miskin	100	Menunjang

	<p>Kabupaten Brebes</p> <p>Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes</p>	stimulus pembayaran PBB (Orang)		<p>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>			
3	<p>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</p>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	100	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)		Menunjang
				<p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p>	100	Menunjang
				<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	<p>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</p> <p>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)"</p>	100	Menunjang
				<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis)</p>	100	Menunjang

				<p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</p>		
				<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)</p> <p>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</p>	100	Menunjang
				<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	100	Menunjang

					Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis)	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		

Sedangkan tidak tercapainya target kinerja utama dikarenakan unsur perangkat desa yang banyak menggunakan dana pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak PBB-P2 yang tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan PAD Kabupaten Brebes.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp 18.855.456.735,- dengan realisasi sebesar Rp 17.969.236.751,- dari 2 (dua) program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk Program penunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah dari anggaran sebesar Rp. 13.705.468.495,- terealisasi sebesar Rp. 12.992.807.921,- (94,80%) ada penghematan sebesar 5,2% pada kegiatan tertentu karena dilaksanakan sesuai kebutuhan real yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk Program kinerja utama Badan Pendapatan Daerah dalam menunjang pencapaian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 5.149.988.240,- dan realisasi sebesar Rp. 4.976.428.830,- (96,63%) sehingga terdapat efisiensi total anggaran sebesar Rp 886.219.984,- atau 4,7% diantaranya ada beberapa Sub Kegiatan pada program utama Badan Pendapatan Daerah yang kurang maksimal terserap anggarannya karena dilaksanakan sesuai kebutuhan saja Sub Kegiatan dengan realisasi dibawah 90% sebagai berikut :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
3. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
4. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan Sasaran Strategis untuk mencapai target kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pencapaian target penerimaan Pajak Daerah diantaranya dari mulai kegiatan pendataan objek pajak, penetapan, pelaporan dan keberatan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2023 (*unaudited*) Periode 01 Januari s.d 31
Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1.1	Pajak Daerah	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1.1.06	Pajak Hotel	550.000.000	568.617.536	103,39%	18.617.536
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	550.000.000	568.617.536	103,39%	18.617.536
4.1.1.07	Pajak Restoran	7.000.000.000	6.839.741.857	97,70%	(160.591.177)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.800.000.000	4.173.365.219	109,83%	373.365.219
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	3.800.000.000	2.666.376.638	83,31%	(533.956.396)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	500.000.000	506.850.680	101,37%	6.850.680
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	450.000.000	439.406.168	97,65%	(10.593.832)
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000	67.444.512	134,89%	17.444.512

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4.1.1.09	Pajak Reklame	4.200.000.000	4.086.338.840	97,29%	(113.661.160)
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.400.000.000	3.414.340.300	100,42%	14.340.300
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	800.000.000	671.998.540	84,00%	(128.001.460)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	69.000.000.000	69.634.476.123	100,92%	634.476.123
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	69.000.000.000	69.634.476.123	100,92%	634.476.123
4.1.1.11	Pajak Parkir	600.000.000	527.671.946	87,95%	(72.328.054)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	600.000.000	527.671.946	87,95%	(72.328.054)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	950.000.000	1.027.815.270	108,19%	77.815.270
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	950.000.000	1.027.815.270	108,19%	77.815.270
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.050.000.000	1.468.066.365	29,07%	(3.591.933.635)
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.050.000.000	1.468.066.365	29,07%	(3.591.933.635)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	55.000.000.000	54.692.342.726	99,44%	(307.657.274)
4.1.1.15.01	PBB-P2	55.000.000.000	54.692.342.726	99,44%	(307.657.274)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000.000	40.463.879.116	101,16%	463.879.116
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000	40.463.879.116	101,16%	463.879.116
					-
5	BELANJA DAERAH	18.855.456.735	17.969.236.751	95,30%	886.219.984
5.1	BELANJA OPERASI	18.801.156.735	17.915.208.751	95,29%	885.947.984
5.1.1	Belanja Pegawai	11.755.123.288	11.141.931.585	97,40%	613.191.703
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.474.000	1.826.687.845	89,61%	211.786.155
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.446.233.000	1.329.745.640	91,95%	116.487.360
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.257.000	120.586.392	91,87%	10.670.608
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.051.000	84.770.000	91,10%	8.281.000
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.702.000	67.380.000	93,97%	4.322.000
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.827.000	32.280.000	95,43%	1.547.000
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.482.000	71.188.860	93,08%	5.293.140
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.866.000	5.167.546	88,09%	698.454
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.000	16.680	87,79%	2.320
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.039.000	104.674.709	62,29%	63.364.291

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000	2.719.483	90,65%	280.517
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.998.000	8.158.535	90,67%	839.465
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.582.875.000	1.463.219.757	92,44%	119.655.243
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.582.875.000	1.463.219.757	92,44%	119.655.243
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.596.221.675	6.348.591.370	96,25%	247.630.305
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.404.341.675	6.182.151.370	96,53%	222.190.305
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	191.880.000	166.440.000	86,74%	25.440.000
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.537.552.613	1.503.432.613	97,78%	34.120.000
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.537.552.613	1.503.432.613	97,78%	34.120.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.846.033.447	6.246.541.741	96,02%	272.756.281
5.1.2.01	Belanja Barang	1.358.972.740	1.292.505.900	95,11%	66.466.840
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.358.972.740	1.292.505.900	95,11%	66.466.840
5.1.2.02	Belanja Jasa	3.637.256.500	3.547.311.277	97,53%	89.945.223
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.432.007.500	3.355.150.744	97,76%	76.856.756
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.249.000	7.056.043	53,26%	6.192.957
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000	100,00%	0
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	190.000.000	183.104.490	96,37%	6.895.510
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	210.976.000	191.071.931	90,57%	19.904.069
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.980.000	144.984.931	90,06%	15.995.069
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.996.000	46.087.000	92,18%	3.909.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	842.828.207	750.085.616	89,02%	92.542.591
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	842.828.207	750.285.616	89,02%	92.542.591
5.1.2.05	Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	796.000.000	792.102.442	99,51%	3.897.558
5.1.2.05.02	Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	796.000.000	792.102.442	99,51%	3.897.558

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00%	0
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	200.000.000	100,00%	0
5.2	BELANJA MODAL	54.300.000	54.028.000	99,50%	272.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.300.000	4.300.000	100,00%	0
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.300.000	4.300.000	100,00%	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2023 - 2026, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada Tahun 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) Misi, 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran strategis yang diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes hanya mencapai target 97,80% atau kategori **“Baik”**, untuk Indikator tujuan Badan Pendapatan Daerah terkait Pajak Daerah tercapai 98,34% atau kategori **“Baik”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan misi RPD 2023 - 2026 tercapai sebesar 95,30% atau kategori **“Baik”**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Sub Bidang serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026. dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa ketercapaian antara Indikator Kinerja Utama, Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2023, terjadi persamaan karena persamaan jumlah Indikator kinerja.

Pencapaian target kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis 2023-2026 untuk Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.855.456.735,- terealisasi sebesar Rp. 17.969.508.751,- atau 95,30%, meliputi Belanja Operasi dan sebesar Rp. 18.801.156.735,- dengan realisasi Rp. 17.915.208.751,- atau 95,29% dan Belanja Modal sebesar Rp. 54.300.000,- dengan realisasi Rp. 54.300.000,- atau 100,00% .

Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2023 pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026 sebesar 97,80% atau kategori **“Baik”** untuk Tahun 2023.

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, pada Tahun 2023 progres penyelesaian terhadap Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah dan telah dilaksanakan di tahun sebelumnya serta di Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan cara membangun Sistem Informasi Perpajakan Berbasis Mobile dan website yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;
2. Penguatan kelembagaan dan aturan perpajakan dengan memperkuat landasan hukum pajak daerah;
3. Peningkatan informasi kepada publik tentang pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah, dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa;
6. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
7. Pengkajian potensi pajak daerah baru;
8. Mengumpulkan data masyarakat miskin ekstrim dari pihak-pihak terkait;
9. Melakukan pencocokkan data miskin ekstrim dengan dokumen himpunan ketetapan pajak (DHKP) buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 s.d Rp. 100.000);

10. Memberikan stimulus kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam clasement buku I;
11. Melakukan sosialisasi tentang jenis pelayanan yang akan diberikan;
12. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
13. Menyelesaikan pelayanan dengan ramah dan tepat waktu;
14. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan;
15. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam memberikan pelayanan;
16. Menyediakan sarana untuk pengaduan bagi pengguna layanan

Brebes, 13 Pebruari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**




SUBANDI, SE, M. Si
Pembina
NIP. 19690711 199103 1 010

LAMPIRAN LKjIP

TAHUN 2023

LAMPIRAN LKjIP

TAHUN 2023

Kode	Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1.1	Pajak Daerah	182.850.000.000	179.815.467.425	98,34%	(3.034.532.575)
4.1.1.06	Pajak Hotel	550.000.000	568.617.536	103,39%	18.617.536
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	550.000.000	568.617.536	103,39%	18.617.536
4.1.1.07	Pajak Restoran	7.000.000.000	6.839.408.823	97,71%	(160.591.177)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.800.000.000	4.173.365.219	109,83%	373.365.219
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.200.000.000	2.666.043.604	83,31%	(533.956.396)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	500.000.000	506.850.680	101,37%	6.850.680
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	450.000.000	439.406.168	97,65%	(10.593.832)
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000	67.444.512	134,89%	17.444.512
4.1.1.09	Pajak Reklame	4.200.000.000	4.086.338.840	97,29%	(113.661.160)
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.400.000.000	3.414.340.300	100,42%	14.340.300
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	800.000.000	671.998.540	84,00%	(128.001.460)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	69.000.000.000	69.634.476.123	100,92%	634.476.123
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	69.000.000.000	69.634.476.123	100,92%	634.476.123
4.1.1.11	Pajak Parkir	600.000.000	527.671.946	87,95%	(72.328.054)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	600.000.000	527.671.946	87,95%	(72.328.054)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	950.000.000	1.027.815.270	108,19%	77.815.270
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	950.000.000	1.027.815.270	108,19%	77.815.270
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.050.000.000	1.468.066.365	29,07%	(3.581.933.635)
4.1.1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.050.000.000	1.468.066.365	29,07%	(3.581.933.635)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	55.000.000.000	54.692.342.726	99,44%	(307.657.274)
4.1.1.15.01	PBB-P2	55.000.000.000	54.692.342.726	99,44%	(307.657.274)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000.000	40.463.879.116	101,16%	463.879.116
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000	40.463.879.116	101,16%	463.879.116
					-

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	18.855.456.735	17.969.236.751	95,30%	886.219.984
5.1	BELANJA OPERASI	18.801.156.735	17.915.208.751	95,29%	885.947.984
5.1.1	Belanja Pegawai	11.755.123.288	11.141.931.585	97,40%	613.191.703
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.474.000	1.826.687.845	89,61%	211.786.155
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.446.233.000	1.329.745.640	91,95%	116.487.360
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.257.000	120.586.392	91,87%	10.670.608
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.051.000	84.770.000	91,10%	8.281.000
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.702.000	67.380.000	93,97%	4.322.000
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.827.000	32.280.000	95,43%	1.547.000
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.482.000	71.188.860	93,08%	5.293.140
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.866.000	5.167.546	88,09%	698.454
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.000	16.680	87,79%	2.320
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.039.000	104.674.709	62,29%	63.364.291
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000	2.719.483	90,65%	280.517
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.998.000	8.158.535	90,67%	839.465
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.582.875.000	1.463.219.757	92,44%	119.655.243
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.582.875.000	1.463.219.757	92,44%	119.655.243
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.596.221.675	6.348.591.370	96,25%	247.630.305
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.404.341.675	6.182.151.370	96,53%	222.190.305
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	191.880.000	166.440.000	86,74%	25.440.000
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.537.552.613	1.503.432.613	97,78%	34.120.000
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.537.552.613	1.503.432.613	97,78%	34.120.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.846.033.447	6.573.277.166	96,02%	272.756.281
5.1.2.01	Belanja Barang	1.358.972.740	1.292.505.900	95,11%	66.466.840
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.358.972.740	1.292.505.900	95,11%	66.466.840
5.1.2.02	Belanja Jasa	3.637.256.500	3.547.311.277	97,53%	89.945.223
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.432.007.500	3.355.150.744	97,76%	76.856.756
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.249.000	7.056.043	53,26%	6.192.957
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000	100,00%	-

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	190.000.000	183.104.490	96,37%	6.895.510
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	210.976.000	191.071.931	90,57%	19.904.069
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.980.000	144.984.931	90,06%	15.995.069
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.996.000	46.087.000	92,18%	3.909.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	842.828.207	750.285.616	89,02%	92.542.591
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	842.828.207	750.285.616	89,02%	92.542.591
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	796.000.000	792.102.442	99,51%	3.897.558
5.1.2.05.02	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	796.000.000	792.102.442	99,51%	3.897.558
5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00%	-
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	200.000.000	100,00%	-
5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	200.000.000	100,00%	-
5.2	BELANJA MODAL	54.300.000	54.028.000	99,50%	272.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.300.000	4.300.000	100,00%	-
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	4.300.000	4.300.000	100,00%	-
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.300.000	4.300.000	100,00%	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	50.000.000	49.728.000	99,46%	272.000



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.03 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.03.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.03.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000,00	179.815.571.425,00	98,34	150.333.758.117,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.850.000.000,00	179.815.571.425,00	98,34	150.333.758.117,00
4.1.01	Pajak Daerah	182.850.000.000,00	179.815.571.425,00	98,34	150.321.269.360,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0	12.488.757,00
5	BELANJA DAERAH	18.855.456.735,00	17.969.236.751,00	95,30	18.375.705.001,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.801.156.735,00	17.915.208.751,00	95,29	16.017.416.867,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.755.123.288,00	11.141.931.585,00	94,78	9.770.875.126,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.846.033.447,00	6.573.277.166,00	96,02	6.246.541.741,00
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	54.300.000,00	54.028.000,00	99,50	2.358.288.134,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	1.764.015.934,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	504.673.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	89.599.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.728.000,00	99,46	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	163.994.543.265,00	161.846.334.674,00	98,69	131.958.053.116,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	163.994.543.265,00	161.846.334.674,00	98,69	131.958.053.116,00





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.03 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.03.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.03.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	182.850.000.000,00	0,00	179.815.571.425,00	179.815.571.425,00	(3.034.428.575,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.850.000.000,00	0,00	179.815.571.425,00	179.815.571.425,00	(3.034.428.575,00)
4.1.01	Pajak Daerah	182.850.000.000,00	0,00	179.815.571.425,00	179.815.571.425,00	(3.034.428.575,00)
4.1.01.06	Pajak Hotel	550.000.000,00	0,00	568.617.536,00	568.617.536,00	18.617.536,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	550.000.000,00	0,00	568.617.536,00	568.617.536,00	18.617.536,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	550.000.000,00	0,00	568.617.536,00	568.617.536,00	18.617.536,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.000.000.000,00	0,00	6.839.512.823,00	6.839.512.823,00	(160.487.177,00)
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.800.000.000,00	0,00	4.173.365.219,00	4.173.365.219,00	373.365.219,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.800.000.000,00	0,00	4.173.365.219,00	4.173.365.219,00	373.365.219,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	2.666.147.604,00	2.666.147.604,00	(533.852.396,00)
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	2.666.147.604,00	2.666.147.604,00	(533.852.396,00)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000,00	0,00	506.850.680,00	506.850.680,00	6.850.680,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	450.000.000,00	0,00	439.406.168,00	439.406.168,00	(10.593.832,00)
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	450.000.000,00	0,00	439.406.168,00	439.406.168,00	(10.593.832,00)
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	0,00	67.444.512,00	67.444.512,00	17.444.512,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	0,00	67.444.512,00	67.444.512,00	17.444.512,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.200.000.000,00	0,00	4.086.338.840,00	4.086.338.840,00	(113.661.160,00)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	3.400.000.000,00	0,00	3.414.340.300,00	3.414.340.300,00	14.340.300,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	3.400.000.000,00	0,00	3.414.340.300,00	3.414.340.300,00	14.340.300,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	800.000.000,00	0,00	671.998.540,00	671.998.540,00	(128.001.460,00)
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	800.000.000,00	0,00	671.998.540,00	671.998.540,00	(128.001.460,00)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	69.000.000.000,00	0,00	69.634.476.123,00	69.634.476.123,00	634.476.123,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	69.000.000.000,00	0,00	69.634.476.123,00	69.634.476.123,00	634.476.123,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	69.000.000.000,00	0,00	69.634.476.123,00	69.634.476.123,00	634.476.123,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	527.671.946,00	527.671.946,00	(72.328.054,00)
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	527.671.946,00	527.671.946,00	(72.328.054,00)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	527.671.946,00	527.671.946,00	(72.328.054,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	950.000.000,00	0,00	1.027.815.270,00	1.027.815.270,00	77.815.270,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	950.000.000,00	0,00	1.027.815.270,00	1.027.815.270,00	77.815.270,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	950.000.000,00	0,00	1.027.815.270,00	1.027.815.270,00	77.815.270,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.050.000.000,00	0,00	1.468.066.365,00	1.468.066.365,00	(3.581.933.635,00)
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.050.000.000,00	0,00	1.468.066.365,00	1.468.066.365,00	(3.581.933.635,00)
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.050.000.000,00	0,00	1.468.066.365,00	1.468.066.365,00	(3.581.933.635,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.000.000.000,00	0,00	54.692.342.726,00	54.692.342.726,00	(307.657.274,00)
4.1.01.15.01	PBBP2	55.000.000.000,00	0,00	54.692.342.726,00	54.692.342.726,00	(307.657.274,00)
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	55.000.000.000,00	0,00	54.692.342.726,00	54.692.342.726,00	(307.657.274,00)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000.000,00	0,00	40.463.879.116,00	40.463.879.116,00	463.879.116,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000,00	0,00	40.463.879.116,00	40.463.879.116,00	463.879.116,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000,00	0,00	40.463.879.116,00	40.463.879.116,00	463.879.116,00
5	BELANJA DAERAH	18.855.456.735,00	0,00	17.969.236.751,00	17.969.236.751,00	(886.219.984,00)
5.1	BELANJA OPERASI	18.801.156.735,00	0,00	17.915.208.751,00	17.915.208.751,00	(885.947.984,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	11.755.123.288,00	0,00	11.141.931.585,00	11.141.931.585,00	(613.191.703,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.038.474.000,00	0,00	1.826.687.845,00	1.826.687.845,00	(211.786.155,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.446.233.000,00	0,00	1.329.745.640,00	1.329.745.640,00	(116.487.360,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.446.233.000,00	0,00	1.329.745.640,00	1.329.745.640,00	(116.487.360,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.257.000,00	0,00	120.586.392,00	120.586.392,00	(10.670.608,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.257.000,00	0,00	120.586.392,00	120.586.392,00	(10.670.608,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.051.000,00	0,00	84.770.000,00	84.770.000,00	(8.281.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.051.000,00	0,00	84.770.000,00	84.770.000,00	(8.281.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.702.000,00	0,00	67.380.000,00	67.380.000,00	(4.322.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.702.000,00	0,00	67.380.000,00	67.380.000,00	(4.322.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.827.000,00	0,00	32.280.000,00	32.280.000,00	(1.547.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.827.000,00	0,00	32.280.000,00	32.280.000,00	(1.547.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.482.000,00	0,00	71.188.860,00	71.188.860,00	(5.293.140,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.482.000,00	0,00	71.188.860,00	71.188.860,00	(5.293.140,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.866.000,00	0,00	5.167.546,00	5.167.546,00	(698.454,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.866.000,00	0,00	5.167.546,00	5.167.546,00	(698.454,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.000,00	0,00	16.680,00	16.680,00	(2.320,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000,00	0,00	16.680,00	16.680,00	(2.320,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.039.000,00	0,00	104.674.709,00	104.674.709,00	(63.364.291,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	168.039.000,00	0,00	104.674.709,00	104.674.709,00	(63.364.291,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000,00	0,00	2.719.483,00	2.719.483,00	(280.517,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000,00	0,00	2.719.483,00	2.719.483,00	(280.517,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.998.000,00	0,00	8.158.535,00	8.158.535,00	(839.465,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.998.000,00	0,00	8.158.535,00	8.158.535,00	(839.465,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.582.875.000,00	0,00	1.463.219.757,00	1.463.219.757,00	(119.655.243,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.582.875.000,00	0,00	1.463.219.757,00	1.463.219.757,00	(119.655.243,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.582.875.000,00	0,00	1.463.219.757,00	1.463.219.757,00	(119.655.243,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.596.221.675,00	0,00	6.348.591.370,00	6.348.591.370,00	(247.630.305,00)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.404.341.675,00	0,00	6.182.151.370,00	6.182.151.370,00	(222.190.305,00)
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	12.878.187,00	0,00	12.878.187,00	12.878.187,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	172.199.803,00	0,00	172.199.803,00	172.199.803,00	0,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.118.577,00	0,00	10.118.577,00	10.118.577,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	108.912.690,00	0,00	108.912.690,00	108.912.690,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.783.244.065,00	0,00	2.656.653.010,00	2.656.653.010,00	(126.591.055,00)
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	12.878.186,00	0,00	12.878.186,00	12.878.186,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	30.171.762,00	0,00	30.171.762,00	30.171.762,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.198.722,00	0,00	9.198.722,00	9.198.722,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.878.127.926,00	0,00	1.787.528.676,00	1.787.528.676,00	(90.599.250,00)
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.386.611.757,00	0,00	1.381.611.757,00	1.381.611.757,00	(5.000.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	191.880.000,00	0,00	166.440.000,00	166.440.000,00	(25.440.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	187.800.000,00	0,00	166.440.000,00	166.440.000,00	(21.360.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.080.000,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.537.552.613,00	0,00	1.503.432.613,00	1.503.432.613,00	(34.120.000,00)
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.537.552.613,00	0,00	1.503.432.613,00	1.503.432.613,00	(34.120.000,00)
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	4.371.706,00	0,00	4.371.706,00	4.371.706,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	58.455.968,00	0,00	58.455.968,00	58.455.968,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.434.912,00	0,00	3.434.912,00	3.434.912,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	36.972.150,00	0,00	36.972.150,00	36.972.150,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	705.996.559,00	0,00	675.876.559,00	675.876.559,00	(30.120.000,00)
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.371.706,00	0,00	4.371.706,00	4.371.706,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.242.285,00	0,00	10.242.285,00	10.242.285,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.122.650,00	0,00	3.122.650,00	3.122.650,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	360.584.677,00	0,00	358.584.677,00	358.584.677,00	(2.000.000,00)
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	0,00	348.000.000,00	348.000.000,00	(2.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.846.033.447,00	0,00	6.573.277.166,00	6.573.277.166,00	(272.756.281,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.358.972.740,00	0,00	1.292.505.900,00	1.292.505.900,00	(66.466.840,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.358.972.740,00	0,00	1.292.505.900,00	1.292.505.900,00	(66.466.840,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.779.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(279.000,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.080.000,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	(255.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	208.920.840,00	0,00	202.550.700,00	202.550.700,00	(6.370.140,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	570.866.400,00	0,00	546.003.000,00	546.003.000,00	(24.863.400,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.360.000,00	0,00	22.920.000,00	22.920.000,00	(440.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.515.000,00	0,00	12.365.000,00	12.365.000,00	(150.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.400.000,00	0,00	9.395.200,00	9.395.200,00	(4.800,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.774.500,00	0,00	7.744.500,00	7.744.500,00	(3.030.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.630.000,00	0,00	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	124.462.000,00	0,00	121.482.000,00	121.482.000,00	(2.980.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	278.035.000,00	0,00	251.194.500,00	251.194.500,00	(26.840.500,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000,00	0,00	15.741.000,00	15.741.000,00	(159.000,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.000.000,00	0,00	13.015.000,00	13.015.000,00	(985.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	0,00	7.390.000,00	7.390.000,00	(110.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.637.256.500,00	0,00	3.547.311.277,00	3.547.311.277,00	(89.945.223,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.432.007.500,00	0,00	3.355.150.744,00	3.355.150.744,00	(76.856.756,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.500.000,00	0,00	291.500.000,00	291.500.000,00	(9.000.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.770.505.000,00	0,00	1.765.014.500,00	1.765.014.500,00	(5.490.500,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.320.000,00	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	(2.995.000,00)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.720.000,00	0,00	38.240.000,00	38.240.000,00	(480.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	592.884.000,00	0,00	589.884.000,00	589.884.000,00	(3.000.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.960.000,00	0,00	473.385,00	473.385,00	(3.486.615,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	0,00	5.811.100,00	5.811.100,00	(188.900,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.002.500,00	0,00	55.983.961,00	55.983.961,00	(3.018.539,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00	(2.540.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.000.000,00	0,00	80.039.598,00	80.039.598,00	(9.960.402,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	43.460.000,00	0,00	19.939.200,00	19.939.200,00	(23.520.800,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	487.156.000,00	0,00	473.980.000,00	473.980.000,00	(13.176.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	13.249.000,00	0,00	7.056.043,00	7.056.043,00	(6.192.957,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	(4.128.000,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.249.000,00	0,00	5.184.043,00	5.184.043,00	(2.064.957,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	190.000.000,00	0,00	183.104.490,00	183.104.490,00	(6.895.510,00)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	190.000.000,00	0,00	183.104.490,00	183.104.490,00	(6.895.510,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	210.976.000,00	0,00	191.071.931,00	191.071.931,00	(19.904.069,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.980.000,00	0,00	144.984.931,00	144.984.931,00	(15.995.069,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	(4.520.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.950.000,00	0,00	37.608.777,00	37.608.777,00	(2.341.223,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.640.000,00	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	0,00	8.526.154,00	8.526.154,00	(6.073.846,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000,00	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	(1.710.000,00)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	67.350.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	(1.350.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.996.000,00	0,00	46.087.000,00	46.087.000,00	(3.909.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.996.000,00	0,00	46.087.000,00	46.087.000,00	(3.909.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	842.828.207,00	0,00	750.285.616,00	750.285.616,00	(92.542.591,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	842.828.207,00	0,00	750.285.616,00	750.285.616,00	(92.542.591,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	348.693.207,00	0,00	343.429.016,00	343.429.016,00	(5.264.191,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	494.135.000,00	0,00	406.856.600,00	406.856.600,00	(87.278.400,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	796.000.000,00	0,00	792.102.442,00	792.102.442,00	(3.897.558,00)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	796.000.000,00	0,00	792.102.442,00	792.102.442,00	(3.897.558,00)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	796.000.000,00	0,00	792.102.442,00	792.102.442,00	(3.897.558,00)
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	54.300.000,00	0,00	54.028.000,00	54.028.000,00	(272.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	49.728.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	49.728.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	49.728.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	0,00	49.728.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	163.994.543.265,00	0,00	161.846.334.674,00	161.846.334.674,00	(2.148.208.591,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	163.994.543.265,00	0,00	161.846.334.674,00	161.846.334.674,00	(2.148.208.591,00)





PERJANJIAN

KINERJA

✓ **TAHUN**

✓ **2023**





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUBANDI, S.E., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **URIP SIHABUDIN, SH, MH.**
Jabatan : Pj. Bupati Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

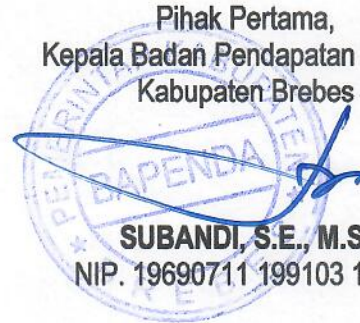
Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Brebes

URIP SIHABUDIN, SH, MH
NIP: 19661224 199103 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

SUBANDI, S.E., M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%)	182.850.000.000
Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)	3000 Orang
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	82

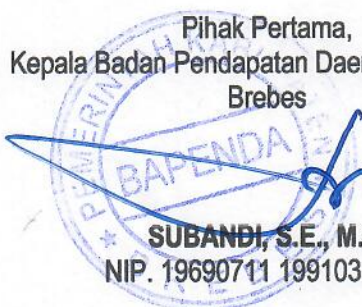
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.705.468.495	APBD Perubahan TA. 2023
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.149.988.240	APBD Perubahan TA. 2023

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Brebes

URIP SIHABUDIN, SH, MH
NIP: 19661224 199103 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes


SUBANDI, S.E., M.Si
 NIP. 19690711 199103 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIKA AGUSTYONO, SH**

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUBANDI, S.E. M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah



SUBANDI, S.E., MSI
NIP. 19690711 199103 1 010

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pendapatan Daerah



WIKA AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : **WIKA AGUSTYONO, SH**
 Unit Kerja : **BAPENDA Kabupaten Brebes**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Angka Ketetapan Pajak Daerah (Milyard Rupiah)	95.000.000.000

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.080.674.632	APBD Perubahan TA. 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Brebes



SUBANDI SE, MSi
 NIP. 19690711 199103 1 010

Brebes, 20 Oktober 2023
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang PBB dan BPHTB
 Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Brebes


WIKA AGUSTYONO, SH
 NIP. 19670820 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUBANDI, S.E., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

SUBANDI, S.E., M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

Brebes, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Badan Pendapatan Daerah

FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si
NIP. 19880223 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : **FETIANA DWINGRUM, S.IP., M.Si**

Unit Kerja : **BAPENDA Kabupaten Brebes**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Angka Ketetapan Pajak Daerah (Milyard Rupiah)	87.850.000.000

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.054.333.108	APBD TA. 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, SE, MSi
NIP. 19690711 199103 1 010

Brebes, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

FETIANA DWINGRUM, S.IP., M.Si
NIP. 19880223 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KRIS ARDIANTY TRISNAWATI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUBANDI, S.E., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, S.E., M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

Pihak Pertama,
Kasubbag Program dan Keuangan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

KRIS ARDIANTY TRISNAWATI, S.E., M.M.
NIP. 19740610 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : KRIS ARDIANTY TRISNAWATI, S.E., M.M.

Unit Kerja : BAPENDA Kabupaten Brebes

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil (lkjip, lkpd, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja dan laporan bulanan) (jenis)	6 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah)	50 Laporan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.035.000	APBD Perubahan TA. 2023
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.563.243.288	APBD Perubahan TA. 2023
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.883.707	APBD Perubahan TA. 2023
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.869.000	APBD Perubahan TA. 2023

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, S.E., M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

Pihak Pertama,
Kasubbag Program dan Keuangan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



KRIS ARDIANTY TRISNAWATI, S.E., M.M.
NIP. 19740610 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISMA NURFEA HARDINI, S.E., M.Si**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUBANDI, SE. M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, S.E. M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

Pihak Pertama,
Kasubbag Program dan Keuangan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

ISMA NURFEA HARDINI, S.E., M.Si
NIP. 19850208 201101 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : ISMA NURFEA HARDINI, S.E., M.Si

Unit Kerja : BAPENDA Kabupaten Brebes

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 12 bulan	4 Laporan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.154.000	APBD Perubahan TA. 2023
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.300.000	APBD Perubahan TA. 2023
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.047.500	APBD Perubahan TA. 2023
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.936.000	APBD Perubahan TA. 2023
5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	14.980.500	APBD Perubahan TA. 2023

Brebes, 20 Oktober 2023



Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

ISMA NURFEA HARDINI, SE, M. SI
NIP. 198502082011012007



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.L SETIYAWAN, SE. Ak**
Jabatan : AKPD sebagai Sub Koordinator Pendaftaran dan Penetapan Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKI AGUSTYONO, SH**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

WIKI AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pendaftaran dan Penetapan
Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Brebes

M.L SETIYAWAN, SE.AK
NIP. 19790530 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.L SETIYAWAN, SE. Ak**
Jabatan : AKPD sebagai Sub Koordinator Pendaftaran dan Penetapan Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKA AGUSTYONO, SH**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

WIKA AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pendaftaran dan Penetapan
Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Brebes

M.L SETIYAWAN, SE.AK
NIP. 19790530 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSRINA ARDHI, S.IP**
Jabatan : AKPD sebagai Sub Koordinator Penagihan, Pelaporan dan Penindakan Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKA AGUSTYONO, SH**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes


WIKA AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Penagihan, Pelaporan dan
Penindakan Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes


YUSRINA ARDHI, S.IP
NIP. 19850620 200904 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : YUSRINA ARDHI, S.IP

Unit Kerja : BAPENDA Kabupaten Brebes

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo (Rp)	55.000.000.000

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.737.034.132	APBD Perubahan TA. 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



WIKA AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Brebes, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
AKPD Sub Koordinator Penagihan, Pelaporan, dan
Penindakan Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Brebes



YUSRINA ARDHI, S.IP
NIP. 19850620 200904 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHOERUL UMAM S.Kom**
Jabatan : AKPD sebagai Sub Koordinator Keberatan dan Pemeriksaan Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIKI AGUSTYONO, SH**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

WIKI AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Keberatan dan Pemeriksaan
Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Brebes

KHOERUL UMAM S.Kom
NIP. 19860821 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : **KHOERUL UMAM, S.Kom**

Unit Kerja : BAPENDA Kabupaten Brebes

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	40.000.000.000	APBD Perubahan TA. 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



WIKI AGUSTYONO, SH
NIP. 19670820 199403 1 011

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,
AKPD Sub Koordinator Keberatan dan Pemeriksaan Bidang
PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



KHOERUL UMAM, S.Kom
NIP. 19860821 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. AGUNG WIBOWO**
Jabatan : AKPD sebagai Sub Koordinator Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si
NIP. 19880223 200701 2 001

Brebes, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pendataan, Pendaftaran dan
Penetapan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

Drs. AGUNG WIBOWO
NIP. 19670606 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : **Drs. AGUNG WIBOWO**
 Unit Kerja : BAPENDA Kabupaten Brebes

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
-	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
-	Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan
-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1000 Dokumen
-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	823.048.108	APBD Perubahan TA. 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Brebes



FETIANA DWININGRUM, S.I.P., M.Si
 NIP. 19880223 200701 2 001

Brebes, 20 Oktober 2023
 Pihak Pertama,
 AKPD Sub Koordinator Pendataan, Pendaftaran dan
 Penetapan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes



Drs. AGUNG WIBOWO
 NIP. 19670606 199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUYATNO EDDY,S.E**

Jabatan : AKPD sebagai Pelaporan dan Pemeriksaan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

FETIANA DWINGRUM, S.IP, M.Si
NIP. 19880223 200701 2 001

Pihak Pertama,
Sub Koordinator Pelaporan dan Pemeriksaan
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

SUYATNO EDDY,S.E
NIP. 19720110 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Pejabat : **SUYATNO EDDY,SE**
 Unit Kerja : **BAPENDA Kabupaten Brebes**

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen
-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	231.285.000	APBD Perubahan TA. 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Brebes



FETIANA DWININGRUM, S.IP., M.Si
 NIP. 19880223 200701 2 001

Brebes, 20 Oktober 2023
 Pihak Pertama,
 AKPD Sub Koordinator Pelaporan dan Pemeriksaan
 Bidang Pajak Daerah dan Retribusi
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes



SUYATNO EDDY,SE
 NIP. 19720110 199903 1 002